

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengadaan

2.1.1 Pengertian Pengadaan

Menurut Febriawati (Sembiring dan Siliwangi, 2017), pengadaan merupakan kegiatan yang melaksanakan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianggarkan pada kegiatan sebelumnya. Menurut (Martono, 2018:7) disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa dalam suatu organisasi/perusahaan biasa disebut dengan departemen pembelian/purchasing. Berkaitan dengan hal tersebut ada yang membedakan fungsi *purchasing* (pembelian sebagai membeli barang-barang kebutuhan organisasi, sedangkan fungsi *procurement* (pengadaan sebagai membeli, menyewah, menukar, dan meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi. Meskipun demikian kedua hal ini memiliki fungsi, pekerjaan, dan tujuan yang mirip yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan perusahaan/organisasi (bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang inventori yang berfungsi sebagai peralatan pemeliharaan) untuk mendukung kelancaran proses operasi di perusahaan.

Menurut Siahaya (2016:1), pengadaan berarti upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan dilakukan dengan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti standar dan etika sesuai dengan metode pengadaan yang diterapkan sebagai pedoman pengadaan.

2.1.2 Jenis Pengadaan

Menurut Ahmadi (2018:13), jenis pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pemahaman lebih detail mengenai jenis-jenis pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Pengadaan Barang

Harga suatu barang berarti pembelian suatu barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, yang dapat diperjual belikan, dimanfaatkan oleh pemakai barang tersebut.

2. Pengadaan jasa lainnya

Perolehan jasa lainnya adalah jasa yang memerlukan keterampilan tertentu, yang mengutamakan keterampilan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu sistem manajemen yang dikenal luas dalam dunia usaha atau untuk melakukan suatu pekerjaan dan/atau memberikan jasa selain jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan pembelian barang.

2.1.3 Tujuan Pengadaan

Menurut Hertin Indira Utojo (2019:6) Tujuan Pengadaan (Procurement Goal) penyelenggaraan kegiatan Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keterpaduan untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, sumber, waktu dan tempat dengan biaya yang optimal.
2. Mewujudkan sistem Pengadaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mewujudkan sistem Pengadaan strategis yang berorientasi pada optimalisasi hasil dan manfaat.
4. Memberikan akses keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dalam proses Pengadaan untuk memperoleh tata Kelola Pengadaan yang baik, sesuai prinsip dan aturan.
5. Memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi para pihak dalam kegiatan Pengadaan.

2.1.4 Fungsi Pengadaan

Tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh bagian pengadaan pada umumnya meliputi sebagai berikut, (Warella, Samuel Y., dkk. 2021: 86):

1. Melakukan perancangan relationship yang tepat dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok dapat berupa kemitraan jangka panjang atau pun hubungan transaksional jangka pendek. Misalnya dengan menggunakan model hubungan relationship.

2. Menentukan / Pemilihan Pemasok (Supplier). Aktivitas penentuan atau pemilihan pemasok dapat memakan waktu dan sumber daya yang cukup banyak, jika pemasok yang dimaksud merupakan pemasok kunci. Kesulitan yang timbul akan lebih besar jika para pemasok yang akan dipilih lokasinya berada di luar negeri (global suppliers). Bagi pemasok utama yang berpotensi membangun hubungan jangka panjang, dapat dilakukan proses seleksi, antara lain evaluasi awal, undangan presentasi, kunjungan lapangan, dan lain-lain. Pemilihan para pemasok kunci ini harus selaras dengan strategi dari supply chain.
3. Penentuan dan implementasi dari teknologi yang sesuai. Penggunaan teknologi akan selalu diperlukan dalam melakukan aktivitas pengadaan. Teknologi yang paling umum digunakan dan tradisional misalnya telepon dan faks. Pengadaan secara elektronik (e-procurement) merupakan aplikasi pengadaan melalui Internet yang umum digunakan dan banyak digunakan oleh banyak perusahaan saat ini. Pemeliharaan data-data supplier dan data item yang diperlukan. Data-data mengenai item-item yang diperlukan maupun data mengenai para pemasok harus dimiliki oleh bagian pengadaan dalam melaksanakan aktivitas seperti misalnya data pemasok yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat semua pemasok, item-item yang dipasok, harga barang per unit, kinerja di masa lalu, lead time pengiriman serta kualifikasi dari pemasok termasuk juga klasifikasinya.
4. Melakukan proses pembelian. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam proses pembelian, seperti pembelian melalui tender atau lelang, (auction) atau pembelian biasa. Kedua jenis pembelian ini melewati proses yang berbeda.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja supplier. Untuk meningkatkan kinerja para penyedia layanan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi agar dapat meningkatkan kinerjanya. Strategi dari supply change dan jenis barang yang dibeli harus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kriteria penilaian.

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadaan

Menurut Edwards, (dalam Yuwinanto, 2018:221) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan, yaitu:

1. Komunikasi Sosialisasi dan pelatihan

Adanya saling komunikasi antar divisi dan melakukan pembekalan terlebih dahulu.

2. Sumber daya

- a. Sumberdaya manusia yang berkualitas

Kualitas sumber daya manusia yang memadai sangat mempengaruhi kelancaran proses pengadaan.

- b. Fasilitas dan anggaran

Salah satu faktor kunci dalam pengadaan adalah jumlah anggaran yang cukup. Semakin besar anggarannya, maka semakin tinggi pula persentase keberhasilan pembeliannya.

3. Disposisi/ sikap pelaksana

- a. Komitmen

Adanya keseragaman kepenahaman dalam menyelesaikan tujuan.

- b. Kejujuran

Transaparansi dalam segala bentuk pengeluaran dalam pengadaan.

4. Struktur Birokrasi

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai sehingga mampu menjabarkan tugas masing-masing divisi

2.2 Makanan Bergizi

Dalam KBBI, makanan merupakan segala sesuatu yang bisa kita makan dan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan gizi merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan kesehatan. Jadi, Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat tertentu yang dapat menunjang proses pertumbuhan tubuh. Gizi atau zat gizi adalah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan serta

memelihara kesehatan dan sebagai sumber energi utama untuk berbagai fungsi metabolisme (Napitupulu, 2018).

2.2.1 Fungsi Makanan Bergizi

Di dalam tubuh manusia makanan bergizi menurut Dwiwardani, (2017:14) memiliki tiga fungsi yang utama, antara lain:

1. Sumber Penghasil Energi

Makanan dapat digunakan sebagai sumber energi. Jika tubuh tersuplai energi dengan baik, seseorang dapat beraktivitas dengan lancar. Sebaliknya jika energi tubuh lemah dan tidak terisi. Sehingga badan terasa lemas dan mudah sakit. Zat penghasil energi terdapat pada lemak, karbohidrat, dan protein.

2. Sumber Zat Pembangun

Makanan bergizi bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan dalam tubuh. Apakah teman-teman sadar bahwa kita itu tumbuh dan berkembang. Zat pembangun jaringan makanan, dapat ditemukan pada makanan yang mengandung mineral, protein, dan air.

3. Sebagai Zat Pengatur

Makanan bergizi berperan dalam mengatur proses alami dalam tubuh. Regulator ini terdapat pada makanan yang mengandung vitamin.

2.3 Stunting

2.3.1 Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (seusia). Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak (BKKBN, 2021). Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh

kekurangan gizi kronis dan seringnya infeksi, ditandai dengan tinggi badan atau tinggi badan di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan di sektor kesehatan. Sedangkan pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -200 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -300 SD (severely student). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak kecil yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan yang tidak sesuai standar, sehingga menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama diberbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia.

Menurut Ginna Megawati dan Siska Wiramihardja (2019:156), stunting dapat dicegah dengan cara sebagai berikut:

1. Mengetahui ciri-ciri stunting dan cara mendeteksinya.
2. Mengetahui akibat dari stunting dan upaya pencegahannya.
3. Memahami gizi seimbang pada remaja putri, ibu hamil dan ibu anak-anak bawah dua tahun untuk mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan
4. Mampu melakukan pendampingan dan memberikan informasi gizi yang tepat pada masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting.

Sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden RI terkait percepatan pengurangan penundaan pelaksanaan Indonesia Emas 2045, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk penanganan penanggulangan tersebut, yang terdiri dari anggaran kementerian pusat, /agensi, pemerintah, dana peruntukan khusus (DAK) fisik, dan dana peruntukan khusus (DAK) nonfisik. Dengan anggaran yang tersedia untuk menangani stunting tersebut diharapkan kasus stunting di Indonesia menurun, dengan target 14% di tahun 2024.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Stunting

Menurut Mayasari (2019:7) faktor-faktor yang menjadi penyebab stunting pada anak diantaranya sebagai berikut:

1. Zat Gizi

Nutrisi adalah senyawa kimia yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Faktor risiko terjadinya stunting pada anak usia 12-24 bulan adalah kurangnya asupan protein dan energi zinc. Anak usia 12-24 bulan berisiko mengalami anemia defisiensi besi yang merupakan faktor risiko defisiensi zinc. Interaksi zat besi dan seng berdampak pada hambatan pertumbuhan tinggi badan sehingga anak terlahir pendek.

2. Penyakit Infeksi

Pemenuhan kebutuhan gizi akan berdampak pada kondisi kesehatan dan bisa juga sebaliknya, yaitu status kesehatan (terutama infeksi) akan berdampak pada status gizi seseorang. Menderita penyakit menular menyebabkan nafsu makan berkurang sehingga makanan berkurang, sedangkan tubuh membutuhkan asupan lebih banyak akibat proses kerusakan jaringan dan peningkatan suhu tubuh. Stunting memiliki hubungan yang signifikan dengan penyakit diare yang berdampak pada balita yang sering mengalami diare berisiko mengalami stunting 3,619 kali lebih besar dari pada balita yang jarang mengalami diare.

3. Genetik

Selain faktor lainnya, faktor keturunan (genetika) merupakan faktor terpenting dalam tercapainya tumbuh kembang seorang anak. Faktor genetik mencakup sejumlah karakteristik normal dan patologis, jenis kelamin, kelahiran dan etnis. Apabila genetika tersebut dapat

berinteraksi dalam lingkungan yang baik dan optimal maka akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal.

4. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Bayi berat lahir rendah adalah anak dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Bayi berat lahir rendah merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, karena penyakit ibu dan janin diduga dapat menjadi faktor yang masih dapat menurunkan kejadian BBLR, bahwa bayi BBLR mempunyai risiko mortalitas dan morbiditas yang tinggi, serta terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan stunting. Berat Badan Lahir Rendah mempengaruhi kejadian stunting pada anak usia 1-2 tahun. BBLR menandakan janin mengalami malnutrisi didalam kandungan, dan stunting diakibatkan oleh malnutrisi yang lama.

5. Pendapatan Keluarga

Prevalensi stunting umumnya dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah secara umum. Keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan gizi buruk membuat banyak orang sering beranggapan bahwa masalah gizi buruk hanya dapat diatasi jika keadaan perekonomian membaik. Tingkat pendapatan tertentu diperlukan untuk mencapai pola makan seimbang.

6. Sanitasi

Sanitasi dasar adalah sanitasi rumah tangga yang meliputi fasilitas khusus, fasilitas pengelolaan sampah, dan sampah rumah tangga. Sanitasi yang buruk merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia, termasuk diare, kolera, disentri, tipus, dan hepatitis A. Sanitasi yang baik sangat penting terutama dalam menurunkan risiko kejadian penyakit dan kematian, terutama pada anak-anak. Stunting juga mempunyai hubungan penting dengan praktik kebersihan, karena bayi yang tumbuh dengan buruk mempunyai risiko 4808 kali lebih besar untuk mengalami gagap dibandingkan bayi yang tumbuh dengan kebersihan yang baik.

7. Air Bersih

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, dan kehidupan sosial budaya. Faktor yang paling penting dan dominan dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan. Salah satu unsur lingkungan yang memegang peranan penting dalam kehidupan adalah air. Secara tidak langsung, jutaan anak lainnya meninggal akibat dampak gabungan dari diare dan kekurangan gizi, karena persediaan air yang terkontaminasi diduga menjadi sumber utama patogen diare.

8. ASI Eksklusif

Pemberian ASI eksklusif atau lebih spesifiknya ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman lain selama enam bulan. Memberi cairan ekstra meningkatkan risiko sakit. Pemberian cairan dan makanan dapat menjadi sarana akses bakteri patogen. Pada masa usia dini, anak sangat rentan terserang bakteri penyebab diare, terutama di lingkungan yang kurang higienis dan sanitasinya buruk. ASI memastikan bayi mendapatkan air bersih yang selalu tersedia.

9. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Pada usia 6-9 bulan, bayi biasanya sudah siap menerima makanan padat baik secara vegetatif maupun psikologis. Makanan padat yang diberikan sebelum sistem pencernaan bayi siap menerimanya menyebabkan makanan tersebut tidak tercerna dengan baik dan dapat menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan (seperti gangguan pencernaan, gas, sembelit, dll). Setelah umur 6 bulan, bayi mulai membutuhkan makanan padat dengan beberapa gizi, seperti zat besi, vitamin C, protein, seng, air dan kalori. Oleh karena itu, penting juga untuk tidak menunda hingga bayi berumur lebih dari 6 bulan karena menunda dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Rendahnya ketersediaan layanan kesehatan disebabkan oleh terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan kurangnya layanan kesehatan lainnya.

2.3.3 Upaya Pencegahan Stunting

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita mengalami gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, sebagai akibat dari masalah gizi yang kronis. Berdasarkan Riskesdas (Survei Kesehatan Dasar) tahun 2018, prevalensi stunting pada anak kecil di Indonesia sebesar 30,8% yang berarti satu dari tiga anak kecil mengalami stunting. Data SSGBI (Survei Status Gizi Anak Indonesia) tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,7%. Sedangkan pada tahun 2021 pada data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) prevalensi stunting sebesar 24,4%, angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan PHI WHO (Public Health Problem Indicator), Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang yaitu $>20\%$.

Adapun upaya pencegahan stunting antara lain:

1. Pemberian Makanan Tambahan

Gizi yang cukup merupakan hak yang berhak didapatkan setiap orang. Nutrisi yang cukup dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal melalui tahapan kehidupan selanjutnya. Dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan gizi dapat meningkatkan kualitas generasi penerus, yang secara tidak langsung meningkatkan manfaat ekonomi penting melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) (Permenkes RI Nomor 51 Tahun 2016) Prevalensi balita usia 6-59

bulan di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting (Waroh, 2019; 48).

2. Edukasi Kesehatan

Pendidikan kesehatan ditujukan kepada ahli gizi kesehatan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting serta melayani langsung Posyandu ibu hamil dan bayi. Dengan meningkatkan pengetahuan kader tentang seluk beluk stunting, diharapkan mereka memperoleh pemahaman yang memadai tentang stunting, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menghadapi permasalahan gizi dan kesehatan yang dihadapi posyandu.

2.4 Regulasi Pencairan Dan Penggunaan Dana Desa

2.4.1 Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa:

1. Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
2. Tahapan Penyaluran :
 - a. Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III.
 - b. Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.
3. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN.

2.4.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGS Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

2.5 Komponen Pengadaan

Menurut Putri Wijayanti dan Siti Sunriwiyati (183:2019) menggemukan bahwa komponen dalam Pengadaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Atau Rincian Produksi

Anggaran atau Rincian Produksi merupakan perencanaan yang disusun secara sistematis untuk mengestimasi dan mengalokasikan sumber daya biaya yang diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa agar proses produksi dapat berjalan dengan efektif.

2. Harga Pembelian

Biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau pelaku usaha dalam memperoleh atau memperoleh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa.

3. Biaya Atau Beban

Biaya persediaan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola persediaan sebelum digunakan dalam proses produksi.

4. Ketetapan Pemasok

Ketetapan pemasok mengacu pada kepastian atau konsistensi pemasok. Ini melibatkan kesediaan pemasok untuk menyediakan produk yang memenuhi standar kualitas, baik dalam hal jumlah maupun kualitas yang disediakan.

5. Jumlah Dalam Sekali Pemesanan

Jumlah persediaan dalam sekali pemesanan adalah kuantitas atau jumlah persediaan yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan atau perusahaan dari pemasok dalam satu kali transaksi atau pesanan tunggal.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Gunawan pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan Di Atas Kapal Dengan Metode Pemilihan Langsung Di PT. Pertamina Perkapalan dikemukakan beberapa kendala dan penyebab dari permasalahan tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Tahapan proses pengadaan barang dan jasa melalui cara seleksi langsung berupa rencana, yaitu rencana tahunan yang biasanya disusun oleh pemilik atau kapal, dan rencana operasional yaitu kapal. . sebuah rencana Perencanaan dan tindak lanjut berupa pengawasan dan evaluasi langsung oleh pemilik. Pembelian barang dan jasa harus dilakukan oleh pemilik. Namun implementasi di website tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

2. Kurang koordinasi antara estimator dengan penyedia barang/jasa, dan dalam pelaksanaan pengadaan masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan hambatan untuk proses tersebut.
3. Kurangnya jumlah pegawai/staff divisi TF3 yang mengakibatkan adanya rangkap kerja sehingga proses pengadaan tersebut tidak berjalan sesuai 62 dengan yang diharapkan baik dari kelengkapan administrasi maupun dari realisasi anggaran yang tidak terserap sesuai plan yang direncanakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma, 2018 “Peranan E-procurement dalam Pencegahan Fraud, Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Prov. Sulawesi Selatan” dengan menggunakan metode kualitatif dikatakan bahwa Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan E-Procurement. Dalam pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan belum berjalan efektif, dikarenakan masih adanya main mata antara penyedia jasa dan panitia pengadaan.

Berikut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky Adrian Dyah Lituhayuh Titik Djumiarti 2017 dengan judul “Implementasi Manajemen-e-Procurement yang Baik Pada Pelayanan Jalan Tol Provinsi Jawa Tengah” dengan pendekatan deskriptif metode kualitatif, mengatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memutuskan pelaksanaan prinsip pengadaan barang/jasa di Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada pelayanan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

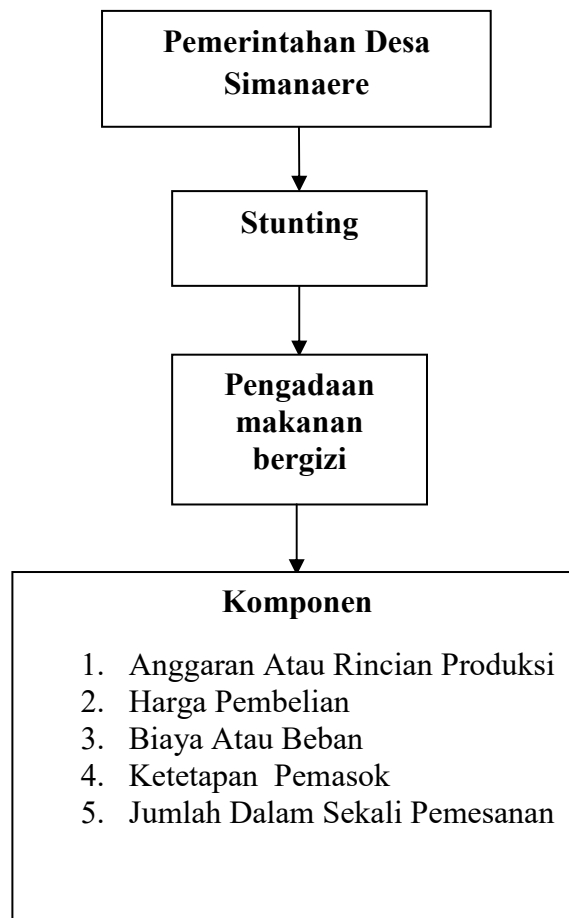
Penelitian terdahulu berikutnya “Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “ oleh Agung Suprianto, Soesilo Zauhar, dan Bambang Santoso Haryono. Dalam penelitian ini Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan

aturan turunannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Analisis penerapan sistem pengadaan elektronik ini diawali dengan analisis prosedur, kegiatan terkait hingga pengolahan informasi dan dokumen dalam sistem pengadaan elektronik; dan b) Penerapan sistem pengadaan elektronik pada proses pengadaan barang/jasa di Fakultas Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya sudah efektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-procurement dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif, dimana tercermin pada tercapainya lima indikator efektivitas, yaitu: (a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (d) Mendukung proses monitoring dan audit; dan (e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Hasil penelitian di Kelompok Kerja ULP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya juga menunjukkan bahwa komposisi personel didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Fakultas Ilmu Administrasi masih sedikit yang memiliki sertifikasi barang dan jasa. Dengan demikian, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/ jasa secara rutin, sehingga dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang handal dan profesional didalam proses e-procurement. (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JIAP Vol. 5 No. 2 (2019) pp 251-259 ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887).

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan satu sama lain. Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peneliti



Sumber: Diolah Oleh Peneliti